

DIKTAT KULIAH

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Disusun Oleh:

Nama: Muchamad Zaenuri, Dr., M.Si.

NIK: 19660828199403 163 025

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

BAHAN AJAR NON ISBN

1	Judul	:	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2	Penyusun	:	Muchamad Zaenuri, Dr., M.Si.
3	NIK	:	19660828199403 163 025
4	Unit kerja	:	Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL

Yogyakarta, 28 Mei 2019

Ketua Program Studi



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa	1
B. Jenis Pengadaan Barang/Jasa	10
C. Lingkup dan Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.....	15
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA	
A. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa	30
B. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	45
C. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	58
D. Etika Pengadaan Barang/Jasa	67
BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA	
A. Identifikasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	75
B. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaku PBJ	87
BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK	
A. Pengadaan PBJ Secara Elektronik	145
B. Kesiapan SDM dan Kelembagaan	168
C. Pengawasan Internal	184
D. Penanganan Pengaduan	198
BAB V PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	
A. Penjelasan dan Klasifikasi PBJ	204

B. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja	208
C. Pemaketan dan Konsolidasi PBJ	212
D. Pengumuman Rencana Umum PBJ	215
BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA	
A. Persiapan Swakelola	220
B. Persiapan PBJ Melalui Penyedia	229
BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA	
A. Tahapan Kegiatan	235
B. Pelaksanaan	241
C. Cara Pembayaran dan Pengawasan	247
BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA	
A. Pelaksanaan Penyedia	253
B. Tender dan Seleksi	257
C. Pelaksanaan Kontrak	262
BAB IX PENGADAAN KHUSUS	
A. PBJ Dalam Rangka Penanganan Darurat	268
B. PBJ Luar Negeri	270
C. Pengecualian dan Penelitian	271
D. Tender/Seleksi Internasional	275
DAFTAR PUSTAKA	279

BAB I PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini penyelenggaraan urusan pemerintahan mustahil untuk dilaksanakan sendiri oleh negara atau pemerintah. Dengan berbagai keterbatasan yang ada pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau kelompok masyarakat. Dalam paradigma *new public management* (NPM) pemerintah yang baik adalah pemerintah yang semakin kecil untuk menangani urusannya secara sendiri, demikian juga pada paradigma *new public service* (NPS) peran serta kelompok masyarakat sangat menentukan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kolaborasi dengan swasta dan kelompok masyarakat yang paling sederhana adalah melalui hubungan kontrak.

Pemerintah menawarkan kepada stakeholder di luar pemerintahan untuk dapat berperan serta memenuhi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat secara umum. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui swakelola maupun menjalin kerjasama dengan pihak lain. Agar tercapai prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, partisipasi dan transparansi maka diperlukan adanya tata kelola yang jelas dalam proses maupun mekanisme pengadaannya.

Pada tahun 2018 yang lalu telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai wujud dari penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. Perpres tersebut sebagai revisi dari perpres sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan dan tuntutan profesionalitas di masa kini. Sebagai perpres yang baruk maka ada beberapa hal yang berbeda